

ABSTRAK

PENYELESAIAN HUKUM ATAS HIBAH PPAT YANG TIDAK SEGERA DIDAFTARKAN OLEH PENERIMA HIBAH YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DI KANTOR PERTANAHAN (STUDI KASUS AKTA HIBAH PPAT NOMOR: 594.4/07/CBU/1996)

Sejak diberlakukannya PP 24/1997 pelaksanaan penghibahan dilaksanakan dengan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang. Penghibahan diatur dalam KUHPdata, KHI dan Hukum Adat. Kepemilikan objek karena hibah beralih kepada Penerima Hibah apabila ia telah mendaftarkannya kepada Badan Pertanahan Nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis letak penguasaan objek hibah tidak segera didaftarkan oleh Penerima Hibah yang telah meninggal dunia di Kantor Pertanahan dan mengetahui upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan agar objek Hibah PPAT dapat dilakukan proses peralihan hak kepada ahli waris dari Penerima Hibah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap Notaris dan PPAT dan Kasubsi pemeliharaan data dan Pembinaan PPAT. Metode analisis data yang digunakan terhadap data primer dan data sekunder adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Letak Penguasaan atas hibah akan beralih kepada Pemberi Hibah secara yuridis dan fisik setelah dilakukannya peralihan kepemilikan kepada Penerima Hibah dengan dilakukannya pengajuan permohonan balik nama atas objek yang dihibahkan kepada Badan Pertanahan Nasional, yang mana peralihan kepemilikan tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak atas objek yang didasarkan atas Akta Hibah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) Upaya Penyelesaian yang dilakukan oleh Penerima Hibah yakni *Pertama*, melakukan upaya pengajuan permohonan penetapan pengadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri atas Akta Hibah agar dapat dikeluarkan suatu penetapan yang nantinya dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan peralihan kepemilikan atas hibah, sehingga Kantor Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkan bukti peralihan kepemilikan berupa Sertifikat Hak atas Objek Hibah dan *Kedua*, membuat Surat Keterangan Waris dan Akta Penegasan dihadapan Notaris yang didalamnya memuat penunjukan dan pernyataan kesepakatannya terhadap objek yang telah dihibahkan yang nantinya diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar peralihan hak kepemilikan atas Objek hibah agar dapat dikeluarkan Sertifikat Hak atas Objek Hibah.

Kata kunci: Hibah, Kekuatan Hukum, Meninggal Dunia dan Tidak Didaftarkan

ABSTRACT

LEGAL SETTLEMENT OF PPAT GRANTS THAT ARE NOT IMMEDIATELY REGISTERED AT THE LAND OFFICE BY GRANT RECIPIENTS WHO HAVE DEAD (CASE STUDY PPAT GRANT DEED NUMBER: 594.4/07/CBU/1996)

Since the enactment Regulation of Government of the Republic of Indonesia Number 24 of 1997, the implementation of grants has been performed with an authentic deed draw up by an authorized Public Official. Grants are regulated in the Civil Code, The Compilation of Islamic Law of Indonesia, and Customary Law. The ownership of the object due to a grant is transferred to the recipient of the grant if he has registered it to the National Land Agency.

This study aims to analyze the position of control over the object of the grant which is not immediately registered to the Land Office by the Grant Recipient who has died and to discover legal settlement efforts that can be made so that the object of the PPAT Grant can be transferred to the Grant Recipient's heirs.

The approach method used in this research is empirical juridical. The specification research used is analytical descriptive, and this research uses interview methods and a literature study. Interviews were conducted with Notaries and PPAT and the Head of Subsidy for data maintenance and PPAT Development. The data analysis method used for primary data and secondary data is qualitative.

This study research shows that the position of control over the grant will be transferred to the Grantor legally and physically after the transfer of ownership to the Grant Recipient by applying for title transfer of the object granted to the National Land Agency, proved by the issuance of Certificate of Rights to the Object Granted based on the Grant Deed made by the authorized official. There are 2 (two) Settlement Efforts formed. First, make efforts to submit a court ruling to the Head of the District Court on the Grant Deed so that stipulation can be issued and will be used as the basis for submitting a transfer of ownership of the grant so the National Land Agency can issued a proof of ownership transfer in the form of a Certificate of Rights on the Object Granted. Second, draw up a Certificate of Inheritance and an Affirmation Deed before a Notaries, which contains the designation and statement of agreement on the object of the grant that has been granted which later will be submitted to the National Land Agency as a basis for transferring ownership rights to the Object Granted so a Certificate of Rights on the Object Granted can be issued.

Keywords: Grant, Legal Force, Death and Not Registered.